

KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BOJONEGORO

Poverty and Income Inequality Among Households in Bojonegoro Regency

Sugiyarto¹, Jangkung Handoyo Mulyo^{1,2}, Rosalia Natalia Seleky¹

¹Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada

²Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

Poverty and inequality have become challenges for most developing countries in the world. Large number of the poor are concentrated in the rural area, and mostly are farmer. The objectives of the study were to identify the poverty occurrence in the rural Bojonegoro and, to analyze the income inequality among them. This research was conducted in rural areas in Bojonegoro Regency, and there were 60 rural households interviewed. The FGT index (Headcount index, Poverty Gap index and Poverty Severity index) and the Criteria of BPS, World Bank, and Asian Development Bank were introduced to identify the poverty occurred in the rural area. Meanwhile, the Gini index and Lorentz curve were employed to measure the income inequality among those households. The result shows that the level of poverty in rural Bojonegoro considered to be quite high (based on the criteria of World Bank and Asian Development Bank), on the contrary, based on BPS criteria, the poverty level is fairly low. The 'depth of poverty' score measured by the FGT index is 0.05, meanwhile the 'severity of poverty' score is 0.02. Furthermore, the income is distributed unequally among the rural households showed by the Gini index of 0.459.

Keywords: *poverty, inequality, income, household*

INTISARI

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi terutama oleh hampir semua negara berkembang. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan isu kesenjangan (*inequality*) pendapatan. Sebagian besar penduduk miskin, dinyatakan dalam banyak tulisan dan kajian, berada di wilayah pedesaan atau merupakan orang yang berasal dari desa dan bermigrasi ke daerah lain dalam rangka mengubah nasibnya. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengidentifikasi kemiskinan rumah tangga pedesaan dan, 2) menganalisis tingkat kesenjangan pendapatan. Lokasi penelitian adalah di beberapa pedesaan di Kabupaten Bojonegoro dengan 60 sampel rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah analisis tabel beberapa kriteria tingkat kemiskinan (*Headcount Index, Poverty Gap Index, Poverty Severity Index*, BPS, Bank Dunia, *Asian Development Bank*), indeks Gini, kurva Lorenz dan indeks FGT. Hasil analisis menunjukkan angka kemiskinan yang tinggi berdasar kriteria ADB dan Bank Dunia, namun berdasar BPS angka kemiskinan cukup rendah. Berdasar hasil indeks FGT diketahui tingkat kedalaman kemiskinan (*depth of poverty*) sebesar 0,05, sementara tingkat keparahan kemiskinan (*severity of poverty*) sebesar 0,02. Lebih lanjut, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam skala sedang dengan indeks Gini 0,459.

Kata kunci: kemiskinan, ketimpangan, pendapatan, rumah tangga

PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk miskin di dunia tinggal di daerah pedesaan dan sebagian lainnya merupakan penduduk desa yang pindah (bermigrasi) ke daerah lain (perkotaan) dalam mencari penghidupan yang lebih baik. Sebagian besar diantara penduduk miskin di pedesaan tersebut adalah petani (Timmer, 2002; Macours and Swinnen, 2008; Abro, Alemu and Hanjra, 2014; Rodriguez-Pose and Hardy, 2015). Di Indonesia, berdasarkan data statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id),

persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada tahun 2013 diperkirakan ada sekitar 14,4 persen penduduk yang tinggal di pedesaan masuk dalam kategori penduduk miskin, sedangkan pada tahun yang sama ada sekitar 8,5 persen penduduk miskin di perkotaan. Namun demikian terdapat tren penurunan angka kemiskinan dari waktu ke waktu

Salah satu definisi pertama tentang kemiskinan adalah yang dirumuskan oleh Seebomh Rowntree pada tahun 1901 (Viet-Wilson, 1986), yang menyatakan bahwa suatu keluarga termasuk dalam kemiskinan

primer jika keseluruhan pendapatannya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk kebutuhan fisik/tubuhnya (yaitu konsumsi pangan). Kemiskinan selain dideskripsikan dari kegagalan pemenuhan standar kebutuhan pangan, juga lebih umum didasarkan atas perbandingan pada standar garis kemiskinan, yakni dikatakan miskin jika pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan. Lebih lanjut, kemiskinan dipandang dari pendekatan kesenjangan merupakan ketidakmerataan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat, utamanya pada kelompok termiskin dengan masyarakat lainnya (Sen, 1981). Ravallion (1994) mendefinisikan garis kemiskinan bagi seorang individu dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang diperlukan seorang individu untuk mencapai level kesejahteraan minimum sehingga tidak disebut miskin.

Kesenjangan (*inequality*) merupakan isu lain yang sering dikaitkan dengan kemiskinan. Menurut Sen (1976) dan Forster *et al.* (1984) dalam Annim *et al.* (2012), hubungan yang erat antara kesenjangan dan kemiskinan adalah bahwa kesenjangan merupakan bagian dari kemiskinan. Sedangkan Barber (2008) dalam Annim *et al.* (2012) memandang hubungan antara kesenjangan dan kemiskinan sebagai hubungan yang pragmatis, yaitu bahwa kesenjangan menyebabkan kemiskinan semakin parah atau kesenjangan adalah bentuk dari kemiskinan. Pada tulisannya Rodriguez-Paso dan Hardy (2015) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kemiskinan dengan kesenjangan, baik yang sifatnya spasial maupun inter-personal. Lebih lanjut dinyatakan hubungan ini lebih kuat antara kesenjangan antar individu (*interpersonal*) dengan kemiskinan dibandingkan dengan kesenjangan spasial.

Dengan demikian, informasi mengenai kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat merupakan informasi yang penting bagi masyarakat dalam menyadari permasalahan yang terjadi sehingga diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dan diambil langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Secara khusus tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan di pedesaan Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dengan memilih desa-desa yang

berada pada daerah marginal, yaitu antara lain di desa-desa tepi hutan, pinggiran sungai dan sekitar pertambangan, yaitu Desa Mulyorejo (Kec. Balen), Desa Kuniran dan Purwosari (Kec. Purwosari), Desa Gayam (Kec. Gayam), Desa Concung (Kec. Bubulan) dan Desa Papringan (Kec. Temayang). Sampel adalah rumahtangga tani dan non pertanian sebanyak 60 responden yang dipilih secara acak.

Untuk mengidentifikasi kemiskinan digunakan beberapa kriteria antara lain kriteria Bank Dunia, *Asian Development Bank*, Badan Pusat Statistik serta perhitungan indeks FGT yaitu *Headcount Index*, *Poverty Gap Index*, dan *Poverty Severity Index*.

a. Kriteria Bank Dunia

Garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia adalah sebesar USD 2 per kapita/hari. Rumah tangga dengan pendapatan per kapita/hari kurang dari tetapan tersebut digolongkan miskin.

b. Kriteria Asian Development Bank

Garis kemiskinan yang ditetapkan Asian Development Bank adalah sebesar USD 1,25 per kapita/hari. Rumah tangga dengan pendapatan per kapita/hari kurang dari tetapan tersebut digolongkan miskin.

c. Kriteria BPS

Garis kemiskinan yang dipakai adalah nominal yang ditetapkan oleh BPS Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp251.323,00/kapita/bulan. Rumah tangga dengan pendapatan per kapita/bulan kurang dari tetapan tersebut digolongkan miskin.

d. *Headcount Index*, *Poverty Gap Index* dan *Poverty Severity Index* (indeks FGT)

Untuk mengukur tingkat kemiskinan diantara rumah tangga digunakan indeks FGT yang meliputi *Headcount Index*, *Poverty Gap Index* dan *Poverty Severity Index* (Haughton and Khandker, 2009):

(1) *Headcount index*

$$P_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I(y_i < z)$$

Dimana,

P_0 = *headcount index*

N = jumlah sampel atau populasi

y_i = pendapatan atau pengeluaran

z = garis kemiskinan

(2) Poverty Gap Index

$$P_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{G_i}{z}$$

$$G_i = (z - y_i) \times I(y_i - z)$$

Dimana,

P_1 = poverty gap index

$I(.)$ = bernilai 0, jika $y > z$

(3) Poverty Severity Index

$$P_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{G_i}{z} \right)^2$$

Dimana,

P_2 = poverty severity index

Guna menganalisis tingkat kesenjangan pendapatan digunakan indeks Gini dan kurva Lorenz.

a. Gini Index

Menurut Oshima (1976) dalam Sugiyarto (2009), termasuk kategori ketimpangan rendah jika $GR < 0,4$, ketimpangan sedang jika $0,4 < GR < 0,5$ dan ketimpangan tinggi jika $GR > 0,5$. *Gini*

Ratio dihitung dengan menggunakan rumus (Haughton and Khandker, 2009),

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^k (f_i - f_{i-1})(y_i + y_{i-1})$$

Dimana,

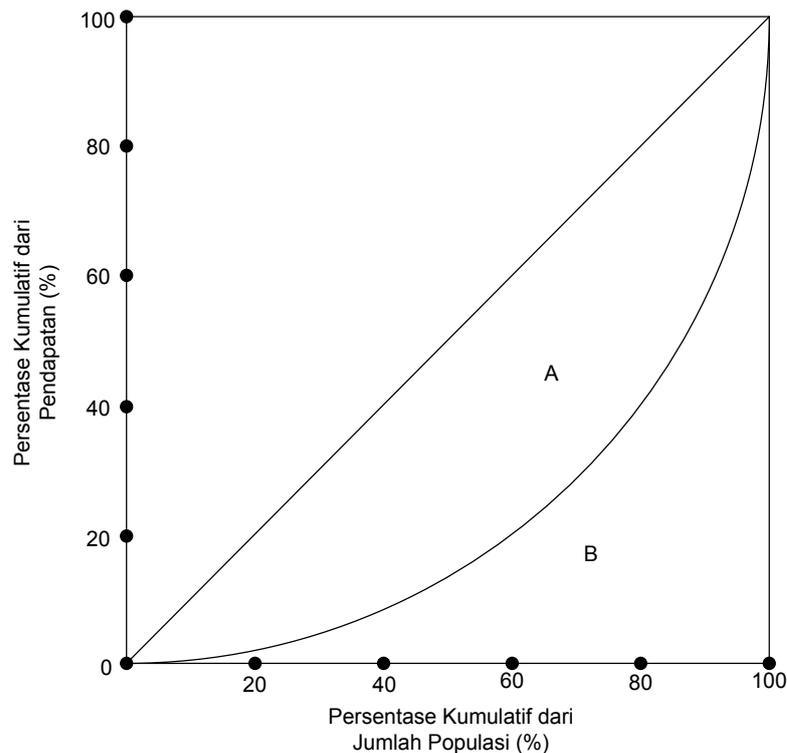
k : banyaknya kelas/kelompok

f_i : proporsi jumlah rumahtangga kumulatif kelas ke- i

y_i : proporsi jumlah pendapatan rumahtangga kumulatif kelas ke- i

b. Kurva Lorenz

Salah satu cara untuk menunjukkan distribusi pendapatan adalah dengan menggunakan kurva Lorenz. Dalam kurva Lorenz ditunjukkan bagaimana hubungan rasio Gini dengan distribusi pendapatan secara visual. Semakin sempit luas daerah A, rasio Gini semakin kecil, maka distribusi pendapatan semakin merata, demikian sebaliknya. Atau dengan kata lain, semakin dekat kurva Lorenz dengan garis diagonal, rasio Gini makin kecil maka distribusi semakin merata. Kurva Lorenz digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kurva Lorenz

Sumber: Haughton and Khandker (2009)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui karakteristik responden mayoritas adalah rumah tangga dengan kepala keluarga yang masih berada pada rentang usia produktif. Sedangkan dari tingkat pendidikannya, mayoritas kepala keluarga hanya menyelesaikan pendidikan dasarnya. Keterbatasan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir serta kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di luar sektor pertanian. Bila dibandingkan antara rerata pendapatan dan pengeluaran, masih terdapat selisih antara pendapatan dan pengeluaran, dimana pendapatan masih lebih besar dibandingkan pengeluaran.

Secara umum karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

No	Keterangan	Nilai
1	Umur kepala keluarga (%)	
	a. 15-64 tahun	95
	b. 0-14 dan > 64 tahun	5
2	Tingkat pendidikan kepala keluarga (%)	
	a. Tidak Sekolah	0
	b. Sekolah Dasar	47
	c. Sekolah Menengah Pertama	22
	d. Sekolah Menengah Atas	20
	e. Akademi/Sarjana	11
3	Pekerjaan utama kepala keluarga (%)	
	a. Petani	52
	b. Bukan Petani	48
4	Rerata pendapatan per kapita/ bulan	Rp. 928.920,-
5	Rerata pengeluaran per kapita/ bulan	Rp. 589.285,-

Sumber: Analisis data primer, 2015

Tabel 2. Keragaan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan kriteria BPS, *Asian Development Bank* (ADB) dan Bank Dunia

Keterangan	Persentase rumahtangga miskin berdasar kriteria (%)		
	BPS Kab. Bojonegoro	ADB	Bank Dunia
Miskin	15	45	62
Tidak Miskin	85	55	38

Sumber: Analisis data primer, 2015

Hasil identifikasi angka kemiskinan berdasarkan 3 (tiga) kategori yaitu BPS Kabupaten Bojonegoro, *Asian Development Bank* dan Bank

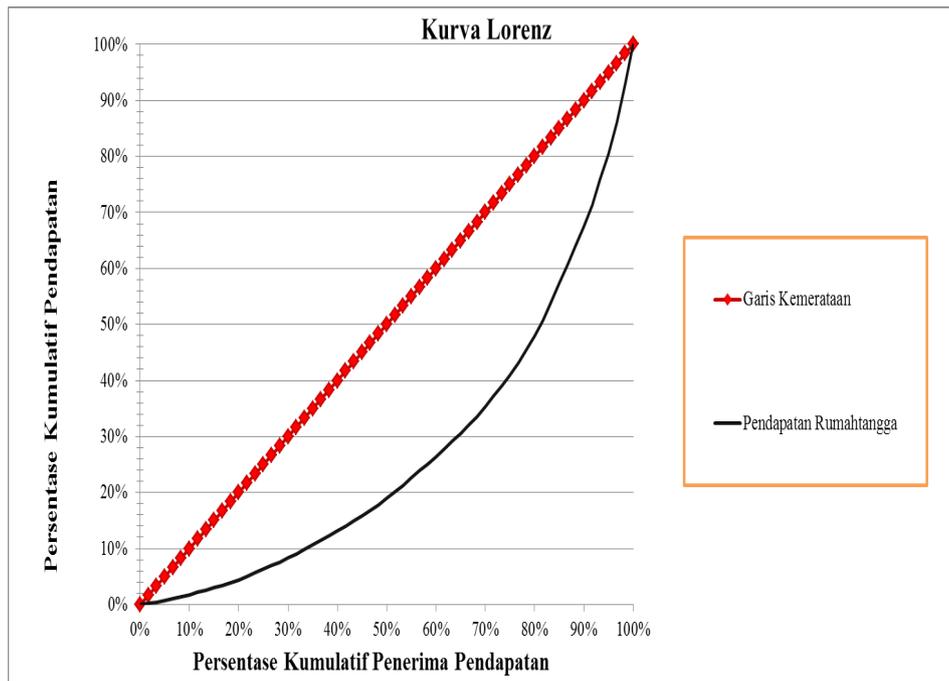
Dunia menunjukkan hasil yang jauh berbeda. Hasil perhitungan angka kemiskinan menurut kriteria BPS Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan angka acuan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp251.323,00 memberikan hasil bahwa ada sekitar 15 persen rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan, hasil ini lebih tinggi dari angka kemiskinan di pedesaan tahun 2012 sebesar 14,3 persen (OECD, 2015). Sementara itu kriteria *Asian Development Bank* mendasarkan pada pendapatan yang diperoleh setiap individu per hari adalah sebesar 1,25 US Dollar. Berdasar kriteria ini, terdapat sekitar 45 persen rumah tangga tergolong miskin. Lebih lanjut hasil analisis menggunakan kriteria Bank Dunia, yaitu dikatakan miskin jika pendapatan per kapita/hari kurang dari 2 US Dollar, menunjukkan bahwa 62 persen rumah tangga tergolong miskin. Perbedaan hasil ini disebabkan karena perbedaan mendasar pada kriteria yang digunakan, dimana BPS mendasarkan pada besaran pengeluaran sementara ADB dan Bank Dunia pada besaran pendapatan. Kondisi di lapangan, seringkali dijumpai adanya kecenderungan dari responden untuk meninggikan pengeluaran dan atau menurunkan nilai pendapatan dari nilai yang sesungguhnya.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dari angka rerata diperoleh rerata pengeluaran per kapita/bulan adalah sebesar Rp589.285,00, sedangkan rerata pendapatan per kapita/hari adalah Rp30.964,00. Hal ini memberikan makna bahwa secara rata-rata rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro tidak tergolong miskin karena angka rata-rata pengeluaran dan pendapatan rumah tangga berada di atas garis kemiskinan. Di sisi lain hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya ketimpangan pengeluaran dan pendapatan di masyarakat. Analisis mengenai ketimpangan pendapatan disajikan pada bagian selanjutnya. Sementara itu, untuk menilik lebih jauh mengenai kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro digunakan analisis dengan indeks FGT yang dapat mengukur kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terjadi.

Tabel 3. Keragaan kemiskinan berdasar indeks *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT)

Indeks FGT	Nilai Indeks
<i>Headcount index</i>	0,15
<i>Poverty Gap index</i>	0,05
<i>Poverty Severity index</i>	0,02

Sumber: Analisis data primer, 2015



Gambar 2. Kurva Lorenz distribusi pendapatan rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro

Hasil perhitungan *headcount index* memberikan angka yang sama dengan kriteria BPS karena garis kemiskinan yang dipakai dalam perhitungan mengacu angka BPS. *Headcount index* sebesar 0.15 menunjukkan bahwa 15 persen rumah tangga dalam populasi tergolong miskin. *Poverty gap index* sebesar 0,05 menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan yang terjadi. Nilai indeks ini juga dapat digunakan untuk menghitung biaya minimum yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara ditransfer kepada individu atau rumah tangga miskin tersebut. Dengan indeks sebesar 0,05 maka besarnya anggaran yang diperlukan untuk ditransfer kepada rumah tangga miskin per bulan sekitar Rp3.514.600,00. Jumlah tersebut adalah total anggaran per bulan untuk ke-9 (15%) rumah tangga miskin, atau rata-rata Rp 390.510,00/rumah tangga/bulan. Namun demikian karena kedalaman (*gap*) kemiskinan tiap rumah tangga miskin berbeda-beda, maka untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan harus ditransfer sejumlah pendapatan yang berbeda-beda untuk tiap rumah tangga miskin tersebut. Keluarga paling miskin perlu mendapat transfer sebesar Rp641.615,00/bulan, sedangkan keluarga miskin yang “terkaya” perlu mendapat transfer sebesar Rp118.209,00/bulan. Tanggung jawab pengentasan kemiskinan tidak hanya pemerintah saja namun juga seluruh komponen masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat dapat mengambil peran lebih dalam upaya penanganan kemiskinan di wilayahnya, antara lain dengan membentuk kelompok (semacam badan amal dan zakat) yang menghimpun dana dari masyarakat mampu dan kemudian menyalurkan (transfer pendapatan) kepada warga miskin. Secara teori, jika data pendapatan masyarakat ada secara rinci, maka konsep transfer pendapatan ini dapat dilakukan, namun metode ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial karena perbedaan nilai transfer pendapatan tersebut. Solusi lain adalah dengan memberikan akses kepada anggota keluarga miskin untuk memperoleh pendapatan melalui penciptaan lowongan pekerjaan bagi mereka.

Tingkat keparahan kemiskinan diukur dengan *poverty severity index*, dimana indeks ini memberikan pembobotan yang berbeda untuk setiap gap kemiskinan tiap rumah tangga. Maknanya semakin besar gap kemiskinan (makin miskin rumah tangga) maka diberikan pembobotan yang semakin besar, sehingga indeks ini juga dapat dikatakan sebagai indeks yang mengukur sensitivitas terhadap kemiskinan. Secara umum, semakin besar nilai indeks ini, maka kemiskinan yang terjadi semakin parah. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai indeks sebesar 0.02 adalah cukup rendah yang maknanya kemiskinan yang terjadi tidak terlalu parah, namun demikian nilai

PSI > (PGI)² mengindikasikan tingkat kemiskinan antar rumah tangga berbeda-beda.

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa secara rata-rata, tingkat pengeluaran dan pendapatan rumah tangga lebih besar dari garis kemiskinan, namun kenyataannya ada kemiskinan yang ditunjukkan HI sebesar 0.15 maka menarik untuk dilihat bagaimana distribusi kemiskinan yang terjadi. Untuk mengetahui bagaimana ketimpangan yang terjadi digunakan indeks Gini dan hasilnya divisualisasikan dalam kurva Lorenz. Berdasar perhitungan diperoleh nilai indeks Gini sebesar 0,459 yang bermakna ada ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat pada tingkat yang sedang. Menurut Oshima (1976) dalam Sugiyarto (2009), termasuk kategori ketimpangan rendah jika $GR < 0,4$, ketimpangan sedang jika $0,4 < GR < 0,5$ dan ketimpangan tinggi jika $GR > 0,5$. Ketimpangan ini terjadi karena adanya perbedaan sumber-sumber pendapatan rumah tangga serta jumlah anggota keluarga yang produktif bekerja dan menghasilkan pendapatan bagi keluarga.

Nilai indeks Gini sebesar 0,459 jika diilustrasikan dalam sebuah kurva ditunjukkan pada Gambar 2. Garis merah diagonal adalah garis pemerataan yang menunjukkan bahwa pada posisi tersebut pendapatan di dalam masyarakat terdistribusi secara merata antar rumah tangga, jika dinilai dengan indeks Gini, garis pemerataan ini memiliki indeks Gini sebesar 0. Semakin jauh kurva Lorenz dari garis pemerataan menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Ketimpangan sempurna terjadi ketika indeks Gini bernilai 1. Dengan ketimpangan sedang menandakan adanya sebagian rumah tangga yang lebih kaya dibandingkan rumah tangga yang lain, atau sebagian yang miskin diantara rumah tangga lainnya. Selanjutnya perlu upaya bersama agar kesenjangan yang terjadi tidak semakin parah sehingga memicu kecemburuan sosial diantara masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa temuan antara lain bahwa angka kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bojonegoro adalah sekitar 15 persen (kriteria BPS), dan lebih dari 40 persen (kriteria ADB dan Bank Dunia). Lebih lanjut, indeks FGT menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan dan

keparahan kemiskinan cukup rendah, maknanya untuk mengentaskan kemiskinan rumah tangga miskin diperlukan sumberdaya dan sumberdana yang tidak begitu besar. Sementara itu terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dalam skala sedang, sehingga meskipun ada beberapa rumah tangga miskin namun mereka tidak terlalu jauh gap/jaraknya dengan rumah tangga tidak miskin lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abro, Z.A., B.A. Alemu and M.A. Hanjra. 2014. Policies for Agricultural Productivity Growth and Poverty Reduction in Rural Ethiopia. *World Development* Vol. 59, pp. 461-474
- Annim, S.K., S. Mariwah and J. Sebu. 2012. Spatial Inequality and Household Poverty in Ghana. *Economic Systems* 36. pp. 487-505
- Badan Pusat Statistik. 2014. Data Kemiskinan. www.bps.go.id
- Houghton, J. and SR. Khandker. 2009. Handbook on Poverty and Inequality. World Bank
- Macours, K. and J.F.M. Swinnen. 2008. Rural-Urban Poverty Differences In Transition Countries. *World Development* Vol. 36 No. 11. pp. 2170-2187
- OECD. 2015. OECD Economic Survey Indonesia March 2015. OECD Publishing
- Ravallion, M. 2004. Poverty and Inequality. World Bank
- Rodriguez-Pose, A. and D. Hardy. 2015. Poverty and Inequality in the Rural Economy from a Global. *Applied Geography* pp. 1-13
- Sen, A. 1981. Poverty and Famines: An Essay Entitlement and Deprivation. Oxford University Press.
- Sugiyarto. 2009. Keputusan Bekerja Luar Usahatani Anggota Rumahtangga Tani di Kawasan Lingkar Gunung Merapi. Thesis Pascasarjana Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada (tidak dipublikasikan)
- Timmer, C.P., 2002. Agriculture and Poverty. Indonesian Food Policy Program. Working paper No. 13.
- Viet-Wilson, J.H., 1986. Paradigm of Poverty: A Rehabilitation of B.S. Rowntree. *Journal of Social Policy* Vol 15. Pp. 69-99